

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Clean and Good Governance) menjadi cita-cita dan harapan bangsa Indonesia, maka salah satu motor penggerak terlaksananya perwujudan / perubahan tersebut adalah Dinas Sosial Kota Mojokerto.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat 2 adalah upaya yang terarah , terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kesiapan unit – unit dalam organisasi tersebut terutama dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian. Data dan Informasi merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian .

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat , sedangkan yang masuk dalam tujuh kategori masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi prioritas penanganan yaitu: (a) Kemiskinan, (b) Keterlantaran, (c) Kecacatan, (d) Keterpencilan, (e) Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, (f) Keterasingan, (g) Korban bencana,Korban Tindak Kekerasan,Eksploitasi & Diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang matang karena perencanaan disini adalah proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya, perencanaan mencakup penentuan semua misi, identifikasi bidang dan menentukan serangkaian tujuan khusus serta menyusun kebijakan, program, dan prosedur untuk mencapainya, sehingga perencanaan memberikan kerangka kerja suatu system terpadu yang kompleks serta berpengaruh pada keputusan- keputusan yang akan diambil pada masa yang akan datang, maka perencanaan merupakan serangkaian kegiatan yang akan digunakan untuk menentukan

arah kedepan (tujuan dan sasaran) dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan akhir yang dikehendaki.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Mojokerto, arah dan sasaran pembangunan sesuai dengan program kebijakan.

Mojokerto, Februari 2014

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MOJOKERTO

Drg. Sri Mudjiwati
Pembina Tk. I
NIP. 19600331 198503 2 006

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	
1.2	Maksud dan Tujuan	
1.3	Landasan Hukum	
1.4	Kedudukan dan Peranan Renstra Dinas Sosial dalam Perencanaan Daerah	
1.5	Sistematika Penulisan	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1	Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi Dinas Sosial....	
2.2	Sumber Daya SKPD	
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD	
2.4	Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	
3.2	Telaahan Visi, Misi, & Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah	
3.3	Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga & Renstra SKPD Prov / Kabupaten	
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKKAN	
4.1	Visi Dan Misi Dinas Sosial	
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
4.3	Strategi dan Kebijakan SKPD	
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Program Dinas Sosial	
5.2	Program Lintas SKPD	
5.3	Program lintas kewilayahan	
5.4	Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	
-	Tabel 5.1	

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- Tabel 6.1

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mengacu visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto terpilih periode tahun 2015 – 2020, yaitu : “ **TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL** “, pembangunan dilaksanakan pada 4 (empat) elemen kehidupan kota, yaitu pemerintahan, masyarakat, swasta dan lingkungan.

Kata “ PEMBANGUNAN” adalah merupakan suatu proses kegiatan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh suatu bangsa dalam menuju suatu perbaikan hari esok yang lebih baik.

Apabila ditilik dari visi dan misi tersebut diatas maka yang dimaksud dengan pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang bercirikan *CLEAN AND GOOD GOVERNANCE*, disiplin, transparan, akuntable, dan memberi ruang untuk peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam hal ini adalah Dinas Sosial yang merupakan bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan, utamanya adalah pembangunan di bidang sosial yang pada intinya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam peran serta perbaikan kondisi ekonomi yang serba sulit karena krisis global yang berkepanjangan dan juga keadaan bangsa Indonesia yang banyak mengalami bencana alam yang melilit saat ini.

Sesuai rencana pencapaian target perbaikan dan peningkatan makro ekonomi untuk pembangunan Kota Mojokerto, maka pembangunan di bidang sosial ini melingkupi pembangunan manusia dan lingkungan sosialnya dengan segala kompleksitas dan implikasinya. Dari sini telah tergambar bagaimana tugas berat nan mulia yang diemban oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto, mengingat permasalahan sosial yang ada sangatlah bermacam-ragam, sedangkan sumber daya manusia yang tersedia sangatlah terbatas untuk dapat ber -

guna pelaksanaan tugas tersebut terbatas, demikian pula anggaran dana yang dialokasikan untuk pembangunan bidang sosial, serta minimnya partisipasi masyarakat seakan-akan melengkapi beban yang terpapar di depan Dinas Sosial Kota Mojokerto.

Oleh karena itu sesuai Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, rencana strategis ini disusun dan digunakan untuk mengarahkan prioritas pembangunan di bidang Sosial.

I.2 Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Perencanaan Strategi Dinas Sosial Kota Mojokerto di maksudkan untuk menetapkan program dan kegiatan pokok yang akan di capainya dalam 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Selanjutnya perencanaan strategi ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Mojokerto yang akan dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat untuk mencapai sesuatu organisasi.
2. Tujuan Penyusunan Perencanaan Strategi adalah :
 - a. Menetapkan visi dan misi yang hendak di capai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Mojokerto.
 - b. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi.
 - c. Menetapkan strategi awal kebijakkan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - d. Menetapkan program dan kegiatan tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

I.3 Landasan Hukum

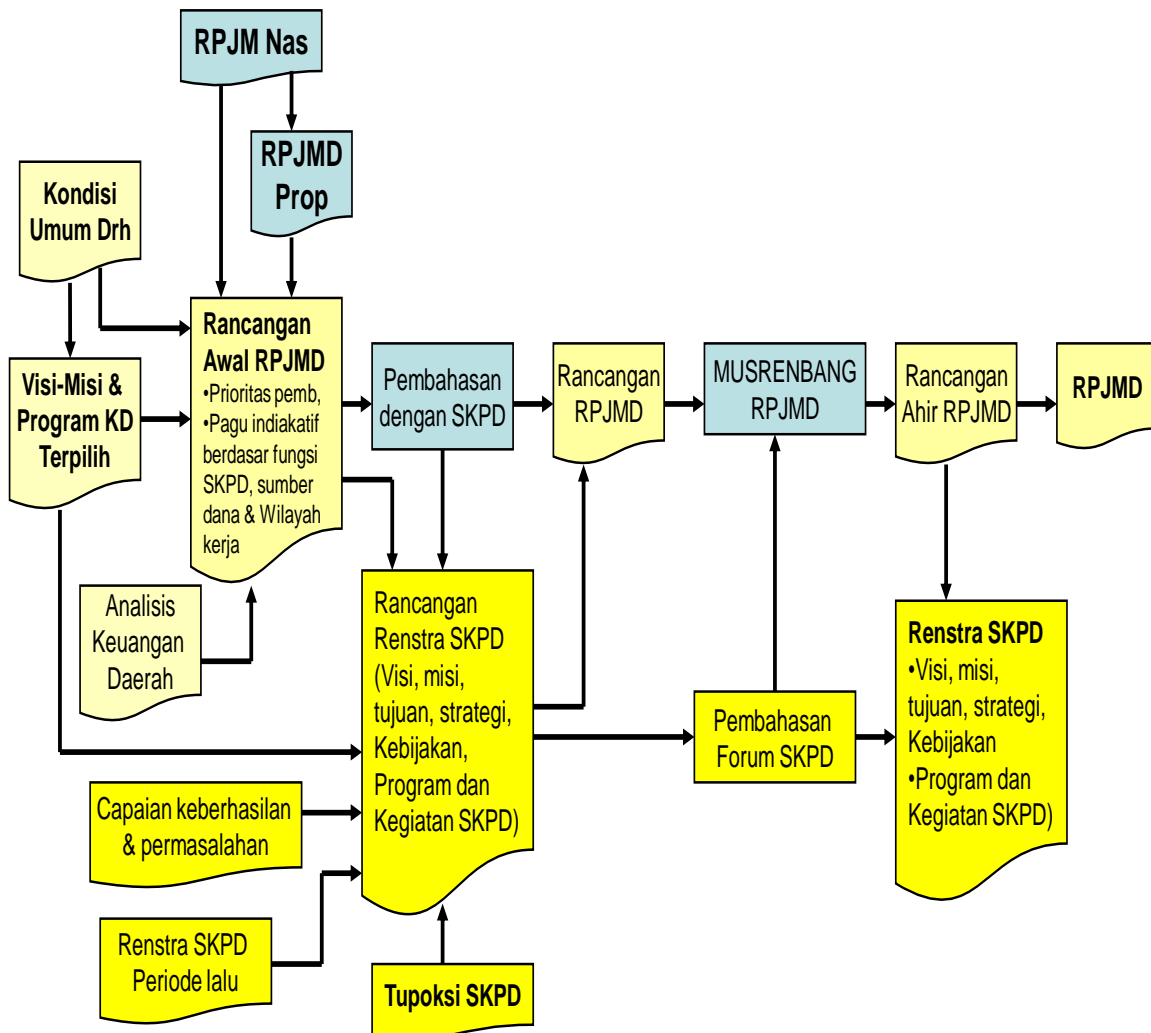
1. Undang – undang No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang- undang No. 17 / 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang No. 32 / 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan pmerintah No. 58 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 65 / 005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 / 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
8. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 000 / M.PPN / 01 / 2007 / 050 / 264 A / SJ / tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG tahun 2007.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 21 tahun 2011, tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Daerah yang disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no.59 / 2007.
11. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan - Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. PERMENDAGRI No. 54 / 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
13. Peraturan Daerah No. 8 / 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian , dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

I.4. Kedudukan Dan Peranan Renstra Dinas Sosial Dalam Perencanaan Daerah

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan masa pimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2015 – 2020. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Karena penyusunan Dokumen Rencana Strategi SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka kualitas penyusunan Rencana Strategis akan sangat ditentukan untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikannya.

Hubungan Proses Penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD



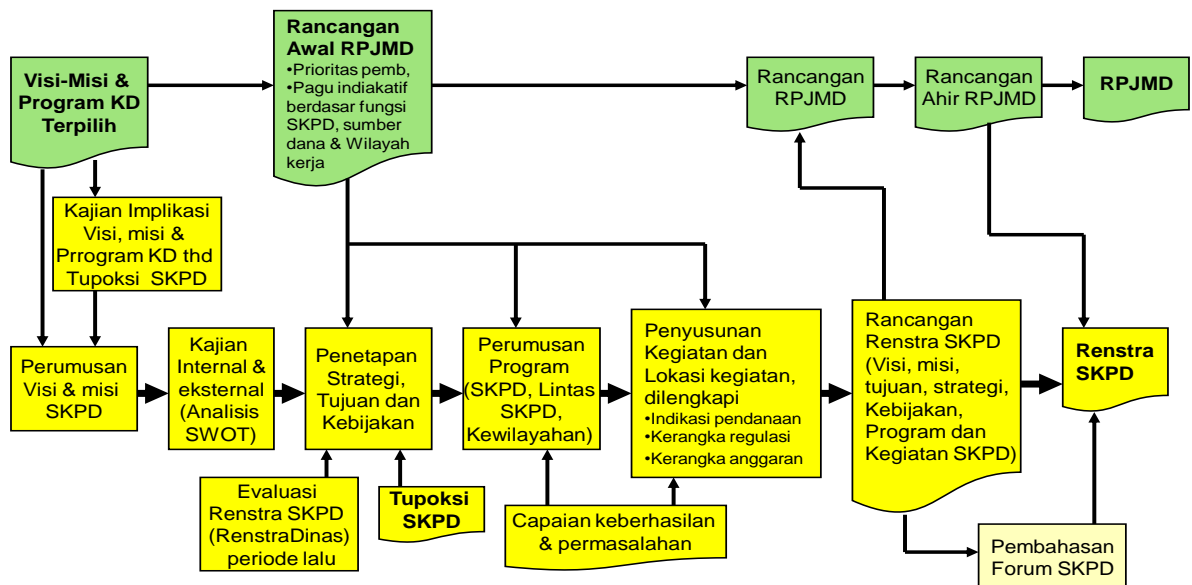
I.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis ini terdiri dari beberapa bagian yang tersusun secara sistematis, yaitu :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL

- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKKAN
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII : PENUTUP
- Lampiran - Lampiran

Proses Penyusunan Renstra SKPD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

(1). Susunan Organisasi terdiri atas :

a. Kepala

b. Sekretariat, yang terdiri atas :

- Sekretaris yang membawahi :

i. Sub Bagian Penyusunan Program

ii. Sub Bagian Keuangan

iii. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Bina Swadaya Sosial, yang terdiri atas :

- Seksi Penyuluhan & Bimbingan Sosial

- Seksi Bina Kesejahteraan Anak & Masyarakat

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas :

- Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat, dan Tuna Sosial.

- Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, yang terdiri atas :

- Seksi Bantuan Bina Organisasi Sosial & Spiritual

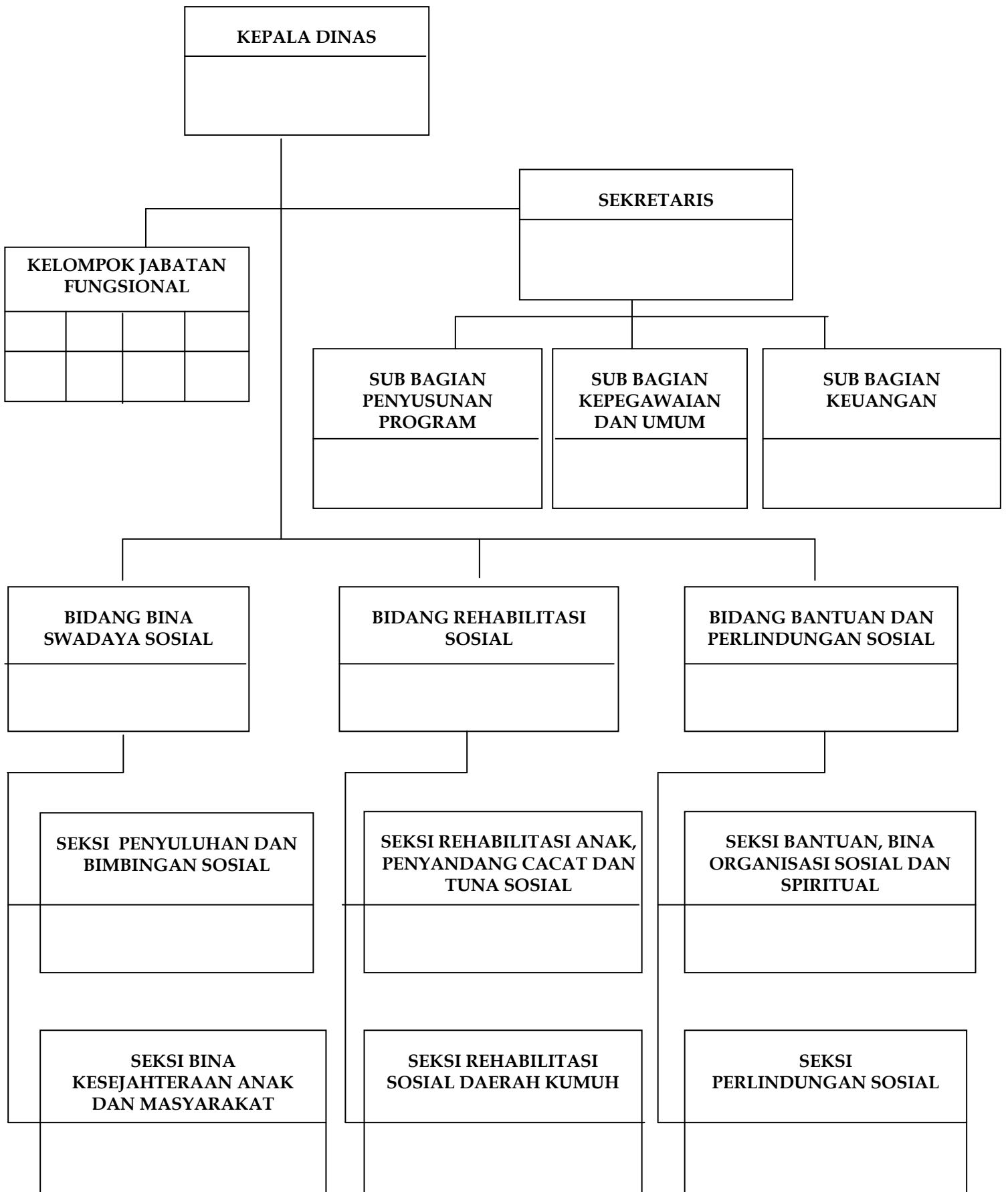
- Seksi Perlindungan Sosial

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3). Bagan susunan Organisasi Dinas Sosial

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO**



2.2 Sumber Daya SKPD

1. Komposisi Pegawai

Sampai dengan Februari 2014, secara keseluruhan jumlah personil Dinas Sosial Kota Mojokerto adalah 28 Orang PNS dan 1 Orang Honorer Daerah, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Kedudukan Dlm Organisasi	Komposisi		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
1. Dinas Sosial			
1.1 Kepala Dinas Sosial	-	1	1
2. Sekretariat			
2.1 Sekretaris	-	1	1
2.2 Sub Bagian Penyusunan Program	1	-	1
2.2.1 Staf Pendukung	-	1	1
2.3 Sub Bag Keuangan	-	-	-
2.3.1 Staf Pendukung	2	1	3
2.4 Sub Bag Kepegawaian dan Umum	-	1	1
2.4.1 Staf Pendukung	2	-	2
3. Bidang Bina Swadaya Sosial			
3.1 Kepala Bidang BinaSwadaya Sosial	1	-	1
3.2 Kepala Seksi Penyuluhan & Bim – bingan Sosial	-	1	1
3.2.1 Staf Pendukung	2	-	2
3.3 Kepala Seksi Bina Kesejahteraan A- nak & Masyarakat	-	1	1
3.3.1 Staf Pendukung	1	-	1
4. Bidang Rehabilitasi Sosial			
4.1 Kepala Bidang Resos	-	1	1
4.2 Kepala Seksi Rehabilitasi Anak, PACA & Tuna Sosial	1	-	1
4.2.1 Staf Pendukung	1	1	2
4.3 Kepala Seksi RSDK	-	1	1
4.3.1 Staf Pendukung	1	-	1
5. Bidang Bantuan & Perlindungan Sosial			
5.1 Kepala Bidang Bansos	-	1	1
5.2 Kepala Seksi Bantuan Bina Organisasi Sosial & Spiritual	1	-	1
5.2.1 Staf Pendukung	1	1	2
5.3 Kepala seksi Perlindungan Sosial	-	1	1
5.3.1 Staf Pendukung	1		1
			28

2. Pegawai Menurut Status, Pangkat & Golongan

Dari komposisi pegawai Dinas Sosial Kota yang keseluruhan berjumlah 28 Orang, keseluruhannya 28 telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 Orang Honorer Daerah secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas Sosial menurut status, pangkat dan golongan.

JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS, PANGKAT, DAN GOLONGAN

(Per – Februari 2014)

Status kepeg./Pangkat	Gol. Ruang	Kepala Dinsos	Unit Sekretariat	Kerja Bid. Binsos	Di Bid. Resos	Lingk. Bid. Banso	Dinsos Total
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1. Pembina Tk.I	IV / b	1	1	1	-	-	3
2. Pembina	IV / a	-	1	1	1	1	4
3. Penata Tk.I	III / d	-	1	1	1	1	4
4. Penata	III / c	-	1	-	-	-	1
5. Penata Muda Tk.I	III / b	-	3	1	-	1	5
6. Penata Muda	III / a	-	2	1	-	-	3
7. Pengatur Tk. I	II / d	-	-	-	1	-	1
8. Pengatur	II / c	-	2	-	-	2	4
9. Pengatur Muda Tk.I	II / b	-	-	-	1	1	2
10. Pengatur Muda	II / a	-	1	-	-	-	1
11. Juru Tk. I	I / d	-	-	-	-	-	-
12. Juru	I / c	-	-	-	-	-	-
13. Juru Muda Tk. I	I / b	-	-	-	-	-	-
14. Juru Muda	I / a	-	-	-	-	-	-
B. Honorer Daerah							
	-	-	-	1	-	-	-
Total	-	1	12	5	4	6	29

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Dinas Sosial Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

(Per – Februari 2014)

Status kepeg/pangkat	Kepala Dinsos	Unit Sekretariat	Kerja Bid. Binsos	Di Bid. Resos	Lingk. Bid. Binsos	Dinsos Total
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)						
1. S-3						
2. S-2	-	1	1	1	2	5
3. S-1	1	7	2	2	2	14
4. D-3	-	-	-	-	2	2
5. SLTA / Sederajat	-	4	-	2	1	7
B. Honorer Daerah						
1. SLTA / Sederajat	-	1	-	-	-	1
Total						29

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

Tupoksi Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang sosial yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penyelenggaraan Bantuan Sosial sesuai kebijakan Walikota ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup sosial yang meliputi kerjasama, pembinaan, identifikasi, dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan bantuan sosial.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan sesuai dengan lingkup bidang sosial.
- d. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Isu – Isu Strategis Dinas Sosial

Melihat hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan serta sasaran yang ingin di capai dari visi dan misi Dinas Sosial Kota Mojokerto saat ini maka terdapat isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kesejahteraan sosial periode 2015 s/d 2020. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rawannya penyakit sosial.
2. Ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas umum masih terbatas.

3. Menurunnya tingkat kualitas hidup masyarakat sebagai akibat dari krisis multi dimensi yang berkepanjangan.
4. Menurunnya rasa nasionalisme generasi muda.
5. Kurangnya penghargaan terhadap jasa para pahlawan / perintis kemerdekaan.
6. Kurangnya kesetiakawanan sosial dan kurangnya pemahaman wawasan nusantara.
7. Kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas.

ANALISA SWOT

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk meraih visi dan misi organisasi, selain itu strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan dan program maupun pengalokasian sumber daya yang menentukan apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa hal itu dilakukan.

Untuk menentukan strategi apa yang akan di pilih dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial periode 2015 s/ d 2020, terlebih dahulu perlu di lakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal Dinas Sosial Kota Mojokerto, utuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Sosial Kota Mojokerto. Selain itu juga dilaksanakan penganalisisan terhadap kondisi eksternal Dinas hal itu berguna utuk mengetahui kondisi uang sebenarnya tentang keberadaan peluang dan bahkan untuk mengetahui adanya ancaman yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.

Adapun hasil analisa secara rinci dapat dijelaskan sebagi berikut :

A. Faktor Kekuatan

Ada beberapa aspek yang dapat menjadi unsure kekuatan dari Dinas Sosial Kota Mojokerto, yaitu :

1. Adanya PERDA tentang pembentukan Dinas –Dinas Daerah.
2. Adanya gedung kantor

3. Adanya gedung LIPOSOS sebagai penampungan sementara bagi Tuna Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan sebagai filter dari arus urbanisasi.

Yang memiliki sasaran-sasaran sebagai berikut :

- Gelandangan
 - Pengemis
 - Waria
 - Eks Narapidana
 - Eks PSK
 - Masyarakat yang berada pada ambang batas kemiskinan (marginal group).
4. Adanya kendaraan operasional baik roda empat maupun roda dua.
 5. Adanya dukungan dana.
 6. Adanya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna dalam membantu tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Mojokerto.
 7. Adanya bimbingan / pembinaan bagi Tuna Sosial / PMKS
 8. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak diluar Dinas, yaitu Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Bunda (LPPA Angkasa Bunda), Stasiun Radio Swasta maupun Stasiun Radio milik Dinas Informasi dan Komunikasi, Kepolisian, SATPOL PP, DIKNAS, KUA, Kelurahan, Kecamatan dan Dinas/Instansi/ Kantor lainnya.

B. Faktor Kelemahan

Selain faktor kelemahan yang ada pada Dinas Sosial Kota Mojokerto, ternyata ada beberapa kondisi yang dianggap menjadi kelemahan di dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Makin berkembangnya jumlah warga yang kurang mampu/ menganggap dirinya miskin.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap permasalahan sosial.
3. Rendahnya Sumber Daya Manusia peranan wanita dalam pembangunan.
4. Tidak adanya tempat penampungan sementara (Panti jompo) bagi orang terlantar, jompo terlantar / jompo miskin.
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kesejahteraan PMKS.

C. Faktor Peluang

Kondisi peluang sebagai cerminan dari factor lingkungan eksternal meliputi beberapa kondisi, yaitu :

1. Peningkatan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang lain.
2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
3. Pelaksanaan Razia kepada PMKS.
4. Peningkatan peranan wanita dalam kesejahteraan keluarga.
5. Peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama.
6. Peningkatan kelestarian nilai-nilai kepahlawanan .
7. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

D. Faktor Tantangan

Kondisi yang di prediksi akan menjadi tantangan saat ini dan yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya jumlah kenakalan remaja dan korban narkoba dan HIV / AIDS.
2. Kurangnya ketrampilan bagi PACA.
3. Kurangnya peluang usaha / bekerja sebagai karyawan pada perusahaan / kesempatan kerja yang sempit.
4. Meningkatnya jumlah anak jalanan, PSK, terutama Pengemis dan Gelandangan.
5. Kurang adanya koordinasi dengan dinas lainnya yang terkait dalam masalah penanganan rasia, penanganan korban bencana alam, dan orang terlantar.
6. Tidak terkoordinasinya bentuk penggalan dana sosial.
7. Kurangnya sosialisasi masalah undian berhadiah.
8. Tumbuhnya isu SARA.
9. Kurangnya rasa nasionalisme/kebangsaan.
10. Terhambatnya kelancaran tugas karena keterbatasan sarana dan prasarana.

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

4.1 VISI DAN MISI

1. VISI

Visi Dinas Sosial Kota Mojokerto adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta pengoptimalan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

2. MISI

Misi Pembangunan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto adalah :

- a. Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui bantuan sarana & prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia.
- b. Melaksanakan kebijakan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan organisasi sosial.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

1. Penekanan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui bantuan sarana dan prasarana serta meningkatkan Sumber Daya Manusia.
2. a. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara swadaya dan terorganisasi sehingga usaha kesejahteraan sosial yang berbasis masyarakat akan terus meningkat dan berkembang
- b. Memelihara dan memperkuat ketahanan sosial dan integritas sosial dengan memeperkokoh semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan antar berbagai lapisan masyarakat.

2. SASARAN

1. a. Penekanan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
b. Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.
2. a. Pengoptimalan Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna yang ada di setiap Kelurahan.
b. Pendayagunaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.
c. Peningkatan koordinasi dengan dinas / instansi terkait , lembaga swadaya masyarakat, institusi masyarakat pedesaan, tokoh masyarakat, tokoh agama.

4.3 STRATEGI

- 1.a.Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial usia produktif; wanita rawan sosial , PACA (terpilih / tertentu) , eks Penyandang Masalah Sosial, Keluarga rentan , dan lain-lain yang memenuhi kriteria untuk diberdayakan sumber daya manusianya.
b.Pemberian bantuan, peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- 2.a.Pengoptimalan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna yang ada di kelurahan.
b.Pembentukan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di tiap kelurahan dan tingkat kota.

4.4 KEBIJAKKAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. a. Pengadaan pembinaan , pelatihan ketrampilan , dan pengawasan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berusia produktif dan yang mendapatkan bantuan.
b. Pengadaan bantuan-bantuan sosial, peningkatan pelayanan dan pembangunan panti-panti rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2. a. Peningkatan rasa solidaritas & kesetiakawanan sosial pada seluruh lapisan masyarakat.
- b. Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di tiap kelurahan.

4.5 LANGKAH-LANGKAH YANG DI TEMPUH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Perlu adanya penyuluhan dan pembinaan untuk ketaqwaan serta psikologi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Perlu adanya panti-panti rehabilitasi sosial, dan santunan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori tidak berdaya (disfungsi sosial).
3. Mengadakan pelatihan ketrampilan berusaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial usia produktif.
4. Perlu adanya peningkatan sinergi antar aparat, masyarakat, dan pihak swasta untuk penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BIDANG SOSIAL BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2015 – 2020

Uraian tentang rencana program pembangunan tahunan bidang sosial budaya untuk tahun anggaran 2015 s/d 2020 adalah sebagai berikut :

